

## KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2590/2024
TANGGAL PEMBUATAN	10 April 2023
TANGGAL REVISI	12 September 2025
TANGAL EFEKTIF	17 September 2025
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Kemerkes  EMMILYA ROSA, SKM, MKM  NIP/197305251997032001
NAMA SOP	MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

	1 2/10/2/11/2/11/11/2/11/11/2/11/2/11/2/			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami dasar hukum dan ketentuan mengenai manajemen PNS			
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Pemerintah	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik			
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;				
<ol> <li>Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> </ol>				
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis				
Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara				
yang Melayani Lalu Lintas Domestik				
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
	Komputer, printer, ATK dan koneksi Internet			
	2. Data Kepegawaian (SIMKA, Silk Arsip, dll)			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan proses monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi tidak sesuai ketentuan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual			
<ol><li>Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun</li></ol>	dari Proses Bisnis Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen, dan			
Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima     Maniferian dan punluasi sasara barkala	Dukungan Umum			

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

No	Keglatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kepala Kantor	Kasubag Adum	Analis Kepegawalan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menginstruksikan untuk melakukan monev terhadap pengembangan kompetensi				Nota dinas atau perintah langsung	15 menit	Nota dinas atau perintah langsung	
2	Menugaskan pengelola kepegawaian untuk menyiapkan bahan monev pengembangan kompetensi				Nota dinas atau perintah langsung	15 menit	Disposisi	
3	Menyiapkan bahan monev pengembangan kompetensi				Disposisi	60 menit	Bahan monev pengembangan kompetensi	
4	Menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi				Bahan monev pengembangan kompetensi	60 menit	Draft laporan monev pengembangan kompetensi	
4	Memeriksa laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi		<b>\_</b>		Draft laporan monev pengembangan kompetensi	15 menit	Draft laporan monev pengembangan kompetensi	
5	Memeriksa laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi	<b>\rightarrow</b>			Draft laporan monev pengembangan kompetensi	15 menit	Draft laporan monev pengembangan kompetensi	
6	Menandatangani laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi				Draft laporan monev pengembangan kompetensi	15 menit	Laporan monev pengembangan kompetensi	
7	Memonitoring dan mengevaluasi pengembangan kompetensi				Draft laporan monev pengembangan kompetensi	15 menit	Laporan monev pengembangan kompetensi	

## Riwayat Perubahan

No.	Tanggal Perubahan	Revisi Ke-	Deskripsi Perubahan	Disetujui Oleh
1	10 April 2023	0	Pembuatan SOP	Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM
2	12 Juli 2024	1	<ul> <li>Perubahan kode penomoran SOP menjadi OT.02.02</li> <li>Penambahan dasar hukum Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>Penambahan 3 (tiga) keterangan pada Peringatan terkait:         <ol> <li>tolak gatifikasi</li> <li>pelayanan prima</li> <li>monitoring dan evaluasi</li> </ol> </li> </ul>	Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM
3	12 September 2025	2	Perubahan nama direktorat menjadi Direktorat Penanggulangan Penyakit Perubahan peta proses bisnis penyelenggaraan karantina kesehatan Penambahan dasar hukum Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik	Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM